

PATRIOTISME *PROGRESIF-REVOLUSIONER* DALAM SEJARAH POLITIK INDONESIA ERA 1950-1960

Sahrudin Lubis^{1*}, Hari Zamharir²

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional

Email: sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id¹, hari.zamharir@civitas.unas.ac.id²

Korespondensi: sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id

(Submission 23-06-26, Revisions 15-07-26, Accepted 21-07-26)

Abstract

This article analyzes the construction of the term “progressive-revolutionary” in the literature on Indonesian political history and examines whether this terminology represents a form of patriotism in the context of post-independence Indonesian nationalism. Notwithstanding the global nature of nationalism and patriotism, the decolonization era of the mid-twentieth century in Asia and Africa gave rise to a diverse range of strategies shaped by the dynamic interaction between culture and context—encompassing political ideologies, economic factors, and implicit and/or explicit cultural values prevailing within societies. The term and jargon ‘progressive-revolutionary,’ used by certain political forces and social movements in Indonesia, is closely tied to the heroism of militant segments within society, which constitutes a form of patriotism. Although it is frequently associated with left-wing politics, the progressive-revolutionary emerged as a dominant category of heroism and patriotism during the struggle against the colonial regime and in the pursuit of societal transformation toward greater equality and prosperity. Through the application of concepts and discourse on patriotism, this paper argues that “progressive-revolutionary” during the 1950s and 1960s in Indonesia represented a form of blind patriotism. This was a consequence of the excessive use of ideology, rendering it heavily partisan and lacking in genuine love for the motherland and the nation as a whole. The analytical approach employed is constructionism coupled with meta-analysis for a comprehensive understanding of the subject.

Keywords: *Revolution, independence, patriotism, progressive- revolutioner, Indonesia.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis konstruksi istilah “*progresif-revolusioner*” dalam literatur sejarah politik Indonesia serta menelaah apakah terminologi tersebut merepresentasikan bentuk patriotisme dalam konteks nasionalisme Indonesia pascakemerdekaan. Terlepas dari sifat nasionalisme dan patriotisme yang bersifat global, era dekolonisasi di pertengahan abad ke-20 di Asia dan Afrika telah memunculkan beragam strategi yang dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara budaya dan konteks yang mencakup ideologi politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang implisit dan/atau eksplisit, serta nilai-nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Istilah dan jargon ‘*progresif-revolusioner*’ yang digunakan oleh beberapa kekuatan politik dan gerakan sosial di Indonesia, terkait erat dengan kepahlawanan segmen militan dalam masyarakat, yang merupakan bentuk patriotisme. Meskipun sering dikaitkan dengan politik kiri, *progresif-revolusioner* muncul sebagai kategori heroisme dan patriotisme yang dominan selama perjuangan melawan rezim kolonial dan dalam mengejar transformasi masyarakat menuju kesetaraan dan kemakmuran yang lebih besar. Melalui penerapan konsep dan wacana tentang patriotisme, makalah ini berargumen bahwa *progresif-revolusioner* selama tahun 1950-an dan 1960-an di Indonesia merepresentasikan sebuah bentuk patriotisme buta. Hal ini merupakan konsekuensi dari penggunaan ideologi yang berlebihan, sehingga menjadi sangat partisan dan tidak memiliki rasa cinta yang tulus terhadap tanah air dan bangsa secara keseluruhan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah konstruksionisme yang digabungkan dengan meta-analisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai subjek ini.

Kata Kunci: Revolusi, kemerdekaan, patriotisme, progresif-revolusioner, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka ilmu politik, nasionalisme dan patriotisme merupakan dua konsep yang saling terkait namun tidak identik. Secara umum, nasionalisme dipahami sebagai ideologi politik yang memandang bangsa sebagai komunitas politik utama, yang hak untuk menentukan nasib sendiri diakui (Renan, 1882; Gellner, 1983; Anderson, 1983). Sebaliknya, patriotisme lebih berkaitan dengan sikap afektif berupa cinta, kesetiaan, dan komitmen terhadap tanah air serta komunitas politiknya (Viroli, 1995; Nathanson, 1993). Dengan demikian, nasionalisme menjelaskan bagaimana sebuah bangsa dibangun dan dilegitimasi sebagai sebuah entitas politik, sementara patriotisme menjelaskan bagaimana warga negara membangun ikatan moral terhadap bangsa tersebut. Meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, patriotisme umumnya dipahami memiliki dimensi etis dan emosional yang lebih besar, sedangkan nasionalisme dipandang memiliki dimensi ideologis dan politik yang lebih besar.

Hubungan antara nasionalisme dan patriotisme di Indonesia mengalami perkembangan yang berbeda seiring dengan perubahan konteks sejarah. Pada masa kolonial, patriotisme diekspresikan melalui perjuangan melawan kekuasaan kolonial demi kemerdekaan. Patriotisme didefinisikan sebagai perlawanan terhadap dominasi asing yang tidak terikat oleh perbedaan ideologi politik dan identitas agama. Orientasi patriotisme pun bergeser setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Masalah utama bukan lagi melawan kolonialisme, melainkan bagaimana mempertahankan negara yang baru berdiri sekaligus menentukan arah ideologi dan sistem politik nasional. Pada fase ini, berbagai bentuk nasionalisme muncul, mulai dari nasionalisme moderat, nasionalisme religius, hingga nasionalisme revolusioner yang dipengaruhi oleh ideologi sayap kiri.

Nasionalisme dan patriotisme, meskipun sering digunakan secara bergantian, dapat dibedakan berdasarkan fase-fase dekolonisasi: patriotisme pada era prakemerdekaan dan nasionalisme—bersama dengan patriotisme—pada fase pascakemerdekaan. Serupa dengan ‘isme’ lainnya di zaman modern, nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah ideologi dengan fungsi-fungsi yang mencakup untuk membangkitkan rasa patriotisme—melindungi dan mempertahankan tanah air dari penjajah asing atau kekuatan kolonial.

Rasa nasionalisme awal di Indonesia, menurut Fakhri (2014) adalah nasionalisme Jawa yang muncul sebagai kebangkitan budaya “lama”, dan reaksi terhadap transformasi modern dan global—berdasarkan literatur yang sebagian besar berbahasa Belanda. Meskipun Islamisasi di Jawa pasca-Hindu, yang berkontribusi pada munculnya pandangan dunia yang modern dan rasional, telah disebutkan, Fakhri—yang secara menarik mengeksplorasi sejarah melalui literatur antropologis dan etnografis—gagal menelusuri akar nasionalisme Jawa selama masa pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram dan Perang Diponegoro.

Kegagalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh narasi yang disajikan oleh para cendekiawan yang menjadi rujukan Fakhri—narasi yang lazim pada era modernisme. Asumsi dasar narasi ini adalah bahwa politik modern harus dipisahkan dari agama, yang secara implisit menyembunyikan kesamaan mendasar yang signifikan dalam agama. Sementara pemberontakan petani Banten melawan penjajah Belanda pada akhir abad ke-19, misalnya, dipicu oleh isu agama yang diduga diilhami oleh tasawuf. Sebelumnya, pada awal abad ke-19 (1825–1830). Demikian pula Perang Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda, semakin memanas karena dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang sebenarnya adalah pengikut setia tarekat Syatariyah dalam tasawuf Islam (Dimiyati, 2017).

Perubahan orientasi nasionalisme tersebut berimplikasi terhadap perubahan makna patriotisme. Jika pada masa revolusi fisik patriotisme terutama diukur melalui kesediaan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal, maka pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin, patriotisme mulai diperebutkan oleh berbagai kekuatan politik melalui penggunaan simbol, slogan, dan terminologi tertentu. Salah satu terminologi yang menonjol pada periode tersebut adalah “*Progresif-Revolusioner*” (P-R), yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok politik yang dianggap berada di garis depan perjuangan revolusi Indonesia. Dengan demikian, melakukan kajian mengenai pemaknaan *progresif-revolusioner* pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perdebatan mengenai nasionalisme dan patriotisme dalam sejarah politik Indonesia.

“Revolusi” di Indonesia sendiri memiliki berbagai konsepsi. Soejatno (1974), yang karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Anderson dengan judul “*Revolution and Social Tensions in Surakarta 1945-1950*”, menemukan bahwa—mengutip Taufik Abdullah—revolusi Indonesia bersifat sangat kompleks, mulai dari konflik ideologis di antara kekuatan politik dan sosial hingga konflik

internal di dalam militer, serta ketegangan yang tajam terkait kelompok *santri* dan *abangan*, serta ketegangan di kalangan bangsawan Surakarta sebagai konsekuensi dari persaingan dan dampak kesepakatan pemerintah Indonesia untuk menarik pasukan militer dari Jawa Barat, yang pada akhirnya berujung pada kudeta kelompok Komunis pada Peristiwa Madiun 1948 (dalam Soejatno, 1974). Situasi di atas diamati oleh Reid, yang kemudian mencatat bahwa revolusi tersebut berlangsung dalam dua varian—revolusi nasional dan revolusi sosial. Reid (1974: 47) menulis:

"Kaum Marxis yang berada di pemerintahan meyakini bahwa pada masa awal revolusi, mereka sebaiknya berkonsentrasi pada kekuasaan daripada kebijakan.... Hingga tahun 1948, sikap kepemimpinan Marxis arus utama di Indonesia dengan tegas menentang pencampuran revolusi sosial dengan formula dasar revolusi nasional, terutama jika hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan dan pertumpahan darah. Segala serangan yang bersifat sistemik terhadap struktur hierarkis masyarakat pedesaan harus ditunda."

Di dalam "kelompok-kelompok Marxis", Reid secara garis besar mengelompokkan mereka yang berupaya berjuang dalam kerangka "revolusi sosial" menjadi dua jenis, yaitu yang menerima jalur revolusi parsial dan yang radikal atau sepenuhnya revolusioner. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang berada di dalam pemerintahan, sedangkan kelompok kedua sebagian besar terdiri dari pemuda atau kaum Marxis muda—yang "*cenderung tenggelam dalam romantisme dan kepahlawanan perjuangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh menganggap para petani itu kurang heroik dalam menjalankan tugasnya*" (Reid, 1974: 47).

Artikel ini membahas tentang istilah dan label *progresif-revolusioner* yang dikembangkan pada era kemerdekaan untuk merujuk pada warga negara dan kekuatan politik yang merupakan segmen heroik dan militan dalam masyarakat, yang secara aktif mendukung "revolusi". Meskipun secara umum revolusi memiliki inti berupa perubahan yang mendadak dan berlangsung dalam waktu singkat, revolusi di Indonesia mengalami fase yang berkepanjangan, dengan slogan "*Revolusi Belum Selesai*"—mengingat perjuangan yang belum tuntas melawan kekuatan kapitalis asing yang ingin menguasai negara—di mana semangat revolusioner membara di kalangan beberapa faksi dalam kelompok elite dan massa.

Pertanyaan utama yang diajukan dalam artikel ini adalah: apakah istilah dan label *progresif-revolusioner* tersebut bersifat patriotik? Untuk membatasi pembahasan, artikel ini fokus pada slogan dan label *progresif-revolusioner* di era kemerdekaan pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika slogan dan label tersebut dikembangkan untuk merujuk pada warga negara dan kekuatan politik yang merupakan segmen heroik dan militan dalam masyarakat, yang secara aktif terlibat dalam "revolusi". Berdasarkan rumusan ini, maka artikel ini tidak dimaksudkan untuk membahas sejarah revolusi Indonesia secara keseluruhan, melainkan menganalisis bagaimana istilah atau terminologi *progresif-revolusioner* dikonstruksi dalam berbagai literatur sejarah politik Indonesia serta bagaimana istilah tersebut diposisikan sebagai bentuk patriotisme.

Dengan menggunakan konsep-konsep patriotisme dan nasionalisme sebagai kerangka analisis, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan apakah penggunaan istilah *progresif-revolusioner* benar-benar mencerminkan patriotisme terhadap bangsa Indonesia atau lebih merupakan patriotisme yang didasarkan pada loyalitas ideologis tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam literatur politik kontemporer, patriotisme tidak dipandang sebagai konsep yang tunggal. Viroli (1995) membedakan patriotisme—sebagai kecintaan terhadap republik dan lembaga-lembaga politik—dari nasionalisme yang lebih menekankan pada identitas kolektif suatu bangsa. Nathanson (1993) mendefinisikan patriotisme sebagai semacam kesetiaan moral kepada negara, yang tetap memungkinkan adanya kritik terhadap pemerintah, sementara Habermas melalui konsep patriotisme konstitusional menempatkan kesetiaan kepada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan utama patriotisme modern. Sebaliknya, Schatz, Staub, dan Lavine (1999) membedakan patriotisme menjadi dua bentuk, yaitu patriotisme konstruktif dan patriotisme buta. Patriotisme konstruktif adalah kecintaan terhadap bangsa yang dipadukan dengan kemampuan untuk mengkritik negara, sedangkan

patriotisme buta lebih berfokus pada kesetiaan mutlak terhadap simbol, pemimpin, atau ideologi tertentu.

Perbedaan konseptual ini penting untuk diperjelas karena menjadi dasar untuk menilai apakah istilah “*progresif-revolusioner*” dapat dipahami sebagai bentuk patriotisme inklusif atau sekadar patriotisme yang bersifat ideologis. Untuk mendefinisikan atau menggambarkan gagasan patriotisme, salah satunya bisa dilakukan dengan mengidentifikasi gelombang pertama patriotisme di era pencerahan ketika Eropa sedang dilanda rasionalisme, serta patriotisme historis yang muncul setelahnya pada awal abad ke-18 M. Dinyatakan oleh Weichlein (2006), bahwa: “*Patriotisme meredam tuntutan akan reformasi politik, dengan memandang monarki sebagai agen utama reformasi.... Oleh karena itu, patriotisme tidak melayani tujuan-tujuan oposisi, kritis, atau bahkan revolusioner.*”

Sebagai kritik, Matco Bitschnau & Marlene MuBotter (2024) memulai dengan apa yang mereka sebut sebagai konsep-konsep yang kabur serta konteks yang hilang. Dari situ kemudian muncul konsekuensi-konsekuensi yang problematis, dan catatan penting dari konsekuensi tersebut adalah: (1) dalam hal konsep, “Apakah patriotisme dan nasionalisme dapat dibedakan secara bermakna dan koheren? Apakah keduanya membantu kita memahami keterikatan nasional?”; dan (2) dalam hal konsekuensi, “Bagaimana cara menghindari patriotisme yang baik atau nasionalisme yang buruk?”.

Pada tahun 1970-an, Dolf Sternburger memperkenalkan salah satu konsep patriotisme yang ia sebut sebagai patriotisme konstitusional (*constitutional patriotism*). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh J. Habermas. Dalam konteks Jerman yang bersatu, konsep Sternburger secara garis besar dapat digambarkan sebagai “*solusi atas masalah rumit terkait kesetiaan politik di tengah masyarakat yang semakin multikultural*” (Müller & Scheppele, 2008: 68). Dalam pengertian ini, patriotisme ditempatkan dalam kerangka rasa inklusivitas yang dituntut oleh budaya ‘mayoritas’ sehingga inklusivitas politik dapat dipromosikan. Dalam pengertian ini pula, kasus umat Muslim Bosnia yang juga mendukung patriotisme konstitusional dimaknai “sebagai sarana untuk mempertahankan kesatuan negara....” (Müller & Scheppele, 2008: 68).

Dalam karyanya, Schwartz (2011) mengkaitkan patriotisme konstitusional dengan norma-norma global dan nilai-nilai kemanusiaan yang meminimalkan etnosentrisme. Dengan memperkenalkan perbedaan antara patriotisme konstitusional yang “tebal” dan “tipis”, Schwartz berpendapat bahwa patriotisme konstitusional yang “tipis” “setidaknya menawarkan semacam etos peradaban yang mungkin membantu meredam politik etno-nasional” (Schwartz, 2011: 505).

Varian lain dari patriotisme konstitusional mungkin bisa kita lihat dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang bisa kita sebut sebagai “patriotisme yang dipandu”. Ini bisa kita lihat dalam seruan untuk bersiap memasuki perang yang dipandu oleh ulama terkemuka, KH Muchlas Tegal, dimana para pemuda harus bersiap untuk perjuangan, sementara para tetua berpuasa dan membaca Al-Quran (Bisri, 2021). “Patriotisme yang dipandu” ini kemudian ditulis sebagai patriotisme yang didorong oleh agama—yang akan dikontraskan dengan apa yang dapat disebut sebagai patriotisme yang didorong oleh ideologi.

Konsep-konsep patriotisme lainnya dijelaskan sebagai konsep yang didefinisikan dalam pengertian neoklasik: Patriotisme adalah (1) “lebih berkaitan dengan pandangan politik liberal, penentangan terhadap pemerintahan despotik dan otoriter; (2) didominasi negara, atau dalam kerangka hegemoni negara; (3) patriotisme liberal moderat yang ‘menyesuaikan’ kelebihan Liberalisme, dengan tetap menjunjung tinggi solidaritas sebagai nilai utama warga sipil, dan (4) patriotisme demokratis yang berlandaskan konstitusi” (Collan dalam Samidi dkk., 2020: 34). Berkenaan dengan peran pemerintah negara, Callan dalam Samidi dkk., (2020: 34) mengamati bahwa patriotisme akan muncul sebagai semacam pseudo-patriotisme setiap kali pengembangan patriotisme ‘dipaksakan’ oleh pemerintah, “dan memungkinkan terbentuknya nasionalisme ekstremis” (dan dapat mengakibatkan nasionalisme ekstrem).

Adapun istilah “progresif” dalam politik faksi di Indonesia umumnya memiliki makna konotatif yang mencerminkan semangat politik kiri dan formula pro-Soekarno. Konotasi tersebut kemudian bertolak belakang dengan makna generiknya dalam konsep aslinya yang muncul dari gagasan kemajuan dalam pemikiran modernisme. Kata “kemajuan” atau “progresif” mencakup konsep sosiologis, yaitu gagasan kemajuan dalam perspektif modernisme, yang ditandai oleh perubahan yang direncanakan dengan asumsi bahwa tradisi tidak sejalan dengan modernitas dan harus secara bertahap digantikan oleh

nilai-nilai ‘modern’. Sementara istilah “revolusioner” dikaitkan dengan sikap politik kiri yang mengupayakan perubahan secara cepat.

Dalam konteks sejarah, *progresif revolusioner* tampaknya bermula dari penamaan “kaum revolusioner” atau kelompok-kelompok revolusioner pada tahun-tahun awal revolusi ketika berbagai tantangan kompleks terjadi sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Istilah ini muncul, misalnya, dalam kasus penunjukan residen dan wakil residen oleh pemerintah di Surakarta pada tahun 1946, perlawanan dari berbagai gerakan sosial pun muncul.

”Pada tanggal 9 Oktober, Residen Iskak dan Sudiro diculik oleh organisasi politik yang tidak dikenal. R. Sutardjo Kartohadikusumo mengambil alih posisi residen, tetapi karena ia berpihak pada kelompok feodal, yakni Kasunanan dan Mangkunegaran, partai-partai politik dan anggota DPRD menolak untuk menerimanya... sebagian kecil dari 'elite pemerintah' berusaha membantu kaum ningrat memulihkan kekuasaan mereka. Reaksi cepat datang dari partai-partai politik yang menyebut diri mereka kaum revolusioner.” (Anderson, 1974; 105).

Perlu dicatat bahwa sejak awal, salah satu hal yang membuat revolusi di Surakarta menjadi kacau dan rumit adalah kenyataan perekonomian sosial di wilayah tersebut yang sedang mengalami krisis parah, yang diperparah oleh praktik-praktik suap yang melanggar hukum. Mengacu pada buku Soekarno berjudul *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965), serta karya Dahm (1971), Anderson—yang menerjemahkan karya Soejanto—menulis:

”Ketika pada tanggal 20 Desember 1948, Belanda memasuki kota Surakarta untuk menegakkan kekuasaan mereka, mereka mendapat bantuan dari sebagian priayi. Kondisi ekonomi yang buruk sejak awal tahun 1946 telah menyebabkan meluasnya korupsi, penggelapan aset badan usaha milik negara, dan anarko-sindikalisme di daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Kondisi ekonomi semacam ini juga memicu peningkatan aksi perampokan dan pembegalan.” (In Soejatno, 1974;106).

Progresif-revolusioner juga dikaitkan dengan gerakan militan yang terkait dengan partai politik radikal, PKI (Partai Komunis Indonesia) (Artika, 2016: 134–135). Dalam konteks ini, gagasan Artika tentang patriotisme bertumpu pada ideologi antara tahun 1950–1965, dan adanya lima cerita pendek yang diterbitkan, yaitu: (1) *Istri Kawanku* (istri tetanggaku), (2) *Subang*, (3) *Atik*, (4) *Menyambut Kongres Ke-VI PKI*, dan (5) *Pesta Rakyat* (Artika, 2016: 134–135).

Progresif-revolusioner juga dituntut untuk terwujud, baik di tingkat massa maupun sebagai partai politik progresif. Sebab, di mata Soekarno, kontribusi yang signifikan bagi revolusi tidak hanya akan datang dari gerakan massa, tetapi juga dari partai politik Marhaenis yang kuat—istilah Marhaenisme diciptakan oleh Soekarno, yang setara dengan istilah proletariat dalam konteks Eropa. Jelaslah bahwa Soekarno memimpin pergerakan menuju faksionalisme yang berbeda-beda di dalam bangsa—meskipun ia berupaya mempromosikan persatuan dalam keberagaman.

Di sektor pendidikan, fokus terpusat juga diarahkan pada penanaman nilai-nilai dan pengetahuan dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Demikian pula terhadap perubahan kurikulum, pengenalan sistem sekolah dasar Gotong-Royong, serta sekolah menengah atas Gaya Baru, dan reorientasi pendidikan yang kental dengan nuansa Manipol-USDEK mencerminkan praktik indoktrinasi yang berlangsung secara intensif di sektor pendidikan (Subkhan, 2018; 32).

METODE

Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian kualitatif dalam paradigma konstruktivisme. Ini adalah paradigma yang awalnya diperkenalkan oleh Berger & Luckmann sebagai terobosan pada masa-masa penuh gejolak Perang Vietnam, dimana konstruktivisme—sebagai metodologi generatif—mengedepankan gagasan tentang pentingnya politik makna yang ditafsirkan secara sosial dalam memahami institusi dan aktor. Realitas sejati mungkin tidak dapat dicapai, melainkan hanya dipersepsikan dan saling terkait secara sosial oleh suatu masyarakat tertentu (Gergen, 2018). Dalam konstruksi semacam itu, persepsi dan pandangan dunia—sebuah ideologi—yang tersirat di dalamnya juga diperhitungkan. “Nasionalisme Jawa”, misalnya, merupakan konstruksi sosial yang dapat

mengalami rekonstruksi. Penelitian ini merupakan studi konseptual (*conceptual paper*), yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan meta-sintesis terhadap literatur sejarah politik Indonesia.

Data yang digunakan sebagian besar merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari sejumlah artikel yang dapat diakses secara elektronik di *Google Scholar*. Data yang relevan mengenai patriotisme dikategorikan berdasarkan kerangka konseptual. Kemudian, konsep-konsep patriotisme dan nasionalisme yang ada digunakan dalam mengeksplorasi fenomena munculnya semangat kepahlawanan di kalangan elite dan massa pada tahapan-tahapan revolusi Indonesia yang berurutan. Ideologi dan/atau pandangan dunia yang tersirat diidentifikasi dalam konstruksi patriotisme yang berlaku di kalangan massa dan elite.

Dalam penelitian ini, meta-analisis tidak diterapkan sebagai uji statistik untuk mengukur hubungan statistik—sebagaimana umumnya diterapkan dalam penelitian kuantitatif—melainkan sebagai teknik sintesis konseptual dari berbagai literatur mengenai sejarah politik Indonesia. Analisis dilakukan dalam empat tahap, yaitu: (1) mengidentifikasi penggunaan istilah *progresif-revolusioner* dalam berbagai literatur, (2) mengelompokkan makna yang melekat pada istilah tersebut, (3) membandingkan konstruksi tersebut dengan teori-teori patriotisme, dan (4) menarik kesimpulan mengenai posisi *progresif-revolusioner* dalam spektrum nasionalisme dan patriotisme Indonesia.

Asumsi-asumsi dalam studi mengenai patriotisme *progresif-revolusioner* adalah: terdapat patriotisme berbasis ideologi yang mendominasi pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang melahirkan jalur-jalur yang berbeda, yaitu “nasionalisme radikal”, nasionalisme moderat, dan “nasionalisme” berbasis budaya. Juga diasumsikan bahwa tingkat progresivitas dan semangat revolusioner di dalam istilah *progresif-revolusioner* yang tidak selalu sejalan dengan pengertian patriotisme yang semestinya. Secara hipotetis, patriotisme di Indonesia pasca-kemerdekaan telah didefinisikan dalam kerangka varian-varian nasionalisme berikut: nasionalisme moderat, nasionalisme radikal, serta nasionalisme berbasis budaya yang bersifat harmonis dan paternalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, istilah *progresif-revolusioner* tidak pernah ada sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan selalu muncul dalam kerangka perjuangan ideologis pada masa pascamerdeka di Indonesia. Oleh karena itu, pembacaan terhadap istilah tersebut tidak hanya harus dilakukan melalui pendekatan sejarah politik, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana berbagai aktor politik mengkonstruksi makna patriotisme sesuai dengan orientasi ideologis masing-masing. Dalam konteks ini, istilah *progresif-revolusioner* berkembang sebagai kategori politik yang tidak hanya menggambarkan militansi revolusioner, tetapi juga menjadi alat legitimasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan delegitimasi terhadap kelompok-kelompok lainnya.

Setelah mengambil alih “kekuasaan” dari perusahaan Belanda VOC, pemerintah Hindia Belanda cenderung melemahkan semangat nasionalisme yang meluas di seluruh negeri. Keberadaan nasionalisme Indonesia dipersepsikan secara berbeda oleh para elite Belanda. Kahin (1995), berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat kolonial Belanda pada masa awal kemerdekaan, mencatat bahwa bagi para elite penguasa di Hindia Belanda, tidak ada rasa nasionalisme yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia—hanya beberapa “ekstremis sayap kiri” di kalangan pahlawan Yogyakarta. Namun, di mata tokoh-tokoh Belanda terkemuka seperti van Mook dan van der Plas, nasionalisme Indonesia memang ada; keduanya berpendapat bahwa terdapat “karakter nasionalisme Indonesia” yang meluas.

Sementara itu, di tengah perjuangan kemerdekaan, politik sayap kiri mengupayakan revolusi sosial dalam kerangka ideologis. Revolusi sosial tersebut mencakup propaganda melalui karya seni dan budaya untuk mengubah segmen-segmen masyarakat Indonesia menjadi kelompok *progresif-revolusioner*. Mengutip Jadi (2008), Artika memberikan contoh propaganda bagi perempuan Muslim untuk “mengikuti” jejak Idrus: “...*Bung Idrus telah lama berhenti menjalankan ajaran agama dari orangtuanya. Dia tidak lagi salat lima waktu sehari, juga tidak berpuasa saat bulan Ramadhan*” (Artika, 2016: 136).

Masih mengenai perempuan, saat membahas pasang surut peran perempuan di Indonesia, Pohlman sedikit menyinggung langkah revolusioner dalam status perempuan—status perempuan yang rendah akan ditingkatkan. Mengacu pada Wieringa (2002), Soekarno berjanji bahwa “*penindasan terhadap perempuan akan dihapuskan*” (Pohlman, 2011: 14). Hal ini menyiratkan langkah untuk

melawan peraturan dan norma sosial yang ada—sebuah rencana yang memberikan ruang yang cukup bagi *progresif-revolusioner* untuk menghadapi praktik-praktik keagamaan.

Perkembangan *progresif-revolusioner* juga terlihat dalam bentuk “Aksi Sepihak” atau tindakan tanpa dasar hukum, terutama pada masa Reformasi Agraria. *Progresif-revolusioner* diterapkan secara keliru pada tahun 1960-an sebelum September 1965. Undang-Undang Reformasi Agraria tahun 1960 berjalan lambat dalam pelaksanaannya oleh pemerintahan Soekarno, yang membuat PKI marah, dan karena pendidikan politik massa yang berlebihan dan sarat ideologi yang dilakukan PKI di kalangan masyarakat pedesaan, mereka melakukan aksi massa atas inisiatif sendiri—secara ilegal menduduki dan menguasai tanah di beberapa daerah. Karena kurangnya pemahaman konteks sosial-budaya, massa melakukannya tanpa menyadari bahwa tanah yang diduduki tersebut milik komunitas Muslim dalam status keagamaan waqaf, sehingga terjadi kekacauan (Lembong dalam Nurjihadi, 2019: 5)

Masih terkait Undang-Undang Agraria tahun 1960, Gerrit termasuk di antara para akademisi yang mencatat bahwa masa-masa penerapan Undang-Undang Agraria tersebut telah menimbulkan ketegangan dan kekacauan sosial sebagai akibat dari ketegangan “laten” di kalangan petani di desa-desa, terutama ketegangan antara PKI dan PNI (Partai Nasional Indonesia); serta antara PKI dan NU. Undang-undang tersebut tampaknya telah diterapkan secara keliru. Kami berpendapat bahwa reformasi agraria sebagai bagian dari revolusi telah menciptakan nasionalisme yang harmonis dan persatuan masyarakat di tengah krisis.

Sementara, untuk menunjukkan pergeseran Gereja Katolik dari mendukung sikap (politik) anti-komunisme menjadi penolakan terhadap kekerasan setelah kudeta 1965, Estrelita menulis ulang fakta sebelum tragedi 1965 --mengacu pada Jay (1963)-- bahwa PKI dan BTI melancarkan pengambilalihan secara ilegal atas tanah milik para haji, dengan dalih bahwa “banyak haji telah memanipulasi undang-undang reforma agraria untuk memperluas hak milik mereka dan bahwa tanah tersebut harus dikembalikan kepada rakyat” (Estrelita, 2022: 146). Pada tahap pelaksanaan, sebagaimana dikutip oleh Gerrit, Wartheim menulis:

”Memang pasti ada instruksi dari PKI untuk tidak membedakan antara PKI dan non-PKI serta untuk benar-benar menaati isi Undang-Undang Agraria. Namun, mengingat komposisi partai yang tidak berdasarkan kelas, ada kemungkinan besar bahwa di beberapa daerah, tuduhan-tuduhan tersebut tidak sepenuhnya tanpa dasar.” (Huizer, 1999, p. 47).

Jadi, *progresif-revolusioner* sekali lagi, dalam skala yang lebih besar, dikaitkan dengan kelompok Komunis. Menurut kata-kata cendekiawan Jesuit terkemuka, Magnis-Suseno (2015), ketegangan yang tinggi terasa pada tahun 1961: *”Saya mendapat kesan bahwa PKI selangkah lebih maju di semua lini. Di mana-mana, papan-papan merah PKI, BTI (Barisan Tani Indonesia), dan sebagainya terlihat jelas ... pada akhir tahun 1964, dua surat kabar harian yang menerbitkan tulisan Sayuti Melik atas nama Badan Penyebar Sukarnoisme dilarang terbit, Partai Murba dinonaktifkan”* (Suseno, 2015: 336–337).

Mengenai *progresif-revolusioner*, ia mengamati bahwa negara ini sedang terpecah belah secara tajam: “Pada tahun 1965, bangsa Indonesia sebenarnya sudah terpecah menjadi dua. Yang mendukung NASAKOM—yang pada hakikatnya mendukung agar Indonesia mengikuti jalan PKI—dan mereka yang tidak. PKI menggunakan bahasa yang ekstrem, keras, dan konfrontatif; masyarakat dibagi menjadi kubu ‘*progresif-revolusioner*’ (yaitu mereka yang pro-PKI-Nasakom), sedangkan yang lain dicela sebagai antek Nekolim. Bahasa PKI penuh ancaman...” (Suseno, 2015: 337).

Selain itu, dilaporkan juga bahwa pengangkatan Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani—yang terlalu junior di militer—dilakukan atas pertimbangan Presiden bahwa Omar Dhani berkembang menjadi seorang Soekarno: *”...tampak dalam dirinya 'bibit Sukarno' yang terus tumbuh menjadi keyakinan ideologis-nasionalisme, patriotisme yang makin kukuh”* (Epilog Anhar Gonggong dalam Said, 2013: 566).

Berdasarkan data yang dikumpulkan, untuk membuat pemetaan konsep-konsep patriotisme, *progresif-revolusioner* dapat digambarkan melalui diagram Mienecke dan Pool seperti yang tertuang pada Tabel 1. Penulis menilai bahwa pada dasarnya, *progresif-revolusioner* sangat patriotik dalam manifestasinya berupa perlawanan terhadap imperialisme—meskipun motifnya lebih didorong oleh ideologi dibandingkan dengan sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. Namun, *progresif-*

revolusioner kurang patriotik ketika diterapkan dalam program aksi di ranah domestik, mengingat langkah-langkah keras yang diambil *progresif-revolusioner* dalam “revolusi sosial”.

Tabel 1. Keterukuran Patriotisme/Nasionalisme Menurut Mienecke dan Pool

Spektrum Nasionalisme/Patriotisme	Patriotisme Moderat	Sayap Kiri Ekstrim
Tingkat nasionalisme Mienecke	<i>Kulturnation</i> ; <i>politiknation</i> .	Semakin banyak orang yang beralih ke hal-hal yang didorong oleh ideologi <i>politiknation</i>
Perbedaan yang dikemukakan Pool antara nasionalisme dan patriotisme	Konsep patriotisme lebih dapat diukur	Konsep nasionalisme sulit diukur

Dilihat dari tingkatan “*kulturnation*” dan “*politiknation*” menurut Mienecke, kemungkinan besar dalam kasus *progresif-revolusioner*, lebih banyak orang di tingkatan “*kulturnation*” telah bertransformasi menjadi “*politiknation*”—ini merupakan hal yang positif karena menunjukkan semakin banyaknya warga negara yang secara aktif terlibat dalam urusan publik. Klaim bahwa begitu banyak orang bergabung dengan BTI, atau klaim bahwa begitu banyak relawan telah bersiap untuk “*Ganyang Malaysia*” sejak tahun 1950-an mencerminkan transformasi tersebut. Sayangnya, pencapaian ini diraih dengan tingkat penerimaan yang rendah terhadap kelompok-kelompok sosial-politik yang beragam di Indonesia yang multikultural—sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai aksi sepihak (tindakan kekerasan yang melanggar hukum), sehingga transformasi tersebut tidak mendorong politik demokratis.

Selain itu, dalam pembedaan Pool antara nasionalisme dan patriotisme, tampak jelas bahwa *progresif-revolusioner* dalam politik dalam negeri—di bawah revolusi sosial berbasis ideologi—termasuk dalam kategori yang kurang dapat diukur. Hal ini terjadi karena *progresif-revolusioner* mengalami pendekatan kekerasan yang berlebihan.

Dengan argumen di atas, maka tampaknya tepat jika *progresif-revolusioner* diperbandingkan dengan patriotisme yang didorong oleh agama. Perbandingan ini dilakukan dengan asumsi bahwa terdapat tingkat patriotisme yang sangat tinggi dalam perang-perang seperti perang Sultan Agung melawan penjajah Belanda, Perang Diponegoro melawan penjajah Belanda—pada masa prakemerdekaan atau era kolonial—serta Pertempuran Surabaya pada November 1945. Perang terakhir ini mendapat dukungan penuh dari para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakatnya dalam mempertahankan kemerdekaan; mobilisasi yang dilakukan oleh para ulama terkemuka tersebut atas permintaan pemerintah pusat Republik Indonesia.

Bagan pada Tabel 2 dapat memberikan gambaran mengenai posisi *progresif-revolusioner* dalam patriotisme dan nasionalisme.

Tabel 2. Tingkat Patriotisme P-R: Sebuah Perbandingan

	Nilai-nilai/ideologi	Tingkat patriotisme dalam memerangi musuh dari luar	Tingkat patriotisme dalam memperjuangkan revolusi sosial di dalam negeri
Perang Sultan Agung: (1) serangan pertama terhadap VOC pada tahun 1928; (2) serangan kedua pada tahun 1929.	Secara kasar “Nasionalisme Jawa”	Tinggi	Tidak ada
Perang Diponegoro atau yang dikenal sebagai Perang Jawa, 1925–1930.	Secara kasar “Nasionalisme Jawa”	Tinggi	Tidak ada
1. Dukungan ulama NU dalam Perang Surabaya pada 10 November 1945; 2. Seruan K.H. Muchlis Tegal untuk berperang di Tegal, Jawa Tengah, dalam semangat “patriotisme yang terarah”.	Berbasis agama	Tinggi; hampir tidak ada orientasi untuk merebut kekuasaan di pemerintahan	Tidak ada
<i>Progresif-revolusiner</i> selama Revolusi	Nasionalisme radikal & Marxisme	Tinggi; sangat berorientasi untuk merebut kekuasaan di pemerintahan	Tinggi (dalam arti negatif)

Dalam kasus tindakan kekerasan pada tahun 1945 yang dilakukan oleh sebuah kelompok revolusioner dalam *Peristiwa Tiga Daerah* atau konflik berdarah di tiga wilayah di Jawa Tengah, jelaslah bahwa tindakan semacam itu bukanlah tindakan patriotik. Sebagaimana ditulis A.Z. Bisri:

“Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan, di Tegal terjadi sebuah gerakan sayap kiri yang ingin mengambil alih pemerintahan dari tangan para penguasa Republik setempat.... Tokoh utama gerakan ini adalah Kutil (...), seorang tukang cukur di Talang, dengan menggerakkan para pemuda revolusioner dan lenggaong (jawara desa), Kutil menangkap, menahan, bahkan orang-orang Belanda, pangreh praja (birokrat), dan para penguasa lokal lainnya, yang dituduh sebagai kaki tangan ... (KNIL) dan Jepang.” (Bisri, 2021: 8).

Beragam penafsiran telah lahir di kalangan akademisi mengenai strategi politik Soekarno untuk mewujudkan masyarakat *progresif-revolusioner*. Beberapa pakar memandang bahwa orientasi politik Sukarno lebih tepat dipahami sebagai upaya untuk memobilisasi para revolusioner guna mempertahankan semangat anti-imperialis dan mempercepat transformasi sosial. Namun, ada pula pandangan bahwa pendekatan ini cenderung radikal karena lebih berfokus pada mobilisasi politik dan ideologisasi masyarakat daripada pembangunan lembaga politik yang stabil. Dalam ulasannya terhadap

buku Legge, Houswedell (1973) berpendapat bahwa Soekarno lebih tepat dipahami sebagai pemimpin radikal daripada pemimpin revolusioner.

Menurut Houswedell, kesulitan dalam menempatkan Soekarno sebagai pemimpin revolusioner adalah kecenderungan pendekatannya yang bersifat voluntaristik dan idealistik dalam memandang perubahan sosial sehingga kurang memperhatikan kendala-kendala institusional dan struktural yang dihadapi proses revolusi. Sebagaimana ditulis Houswedell, bahwa: *Hambatan lain dalam menilai Soekarno secara serius sebagai seorang pemimpin revolusioner umumnya terletak pada pendekatannya yang voluntaristik dan idealistik terhadap persoalan revolusi dan perubahan sosial*" (Houswedell, 1973: 115).

Debat itu menunjukkan bahwa *progresif-revolusioner* bukan sekadar jargon politik, tetapi mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai strategi perubahan sosial dan pembangunan negara pada era Demokrasi Terpimpin. Kita tidak boleh menyebutnya sebagai tindakan patriotik ketika BTI secara melanggar hukum menduduki beberapa lahan milik warga negara lain. Hal lain lagi adalah ketika Soekarno memberikan dukungan kepada BTI dalam peringatan hari jadinya, sekali lagi, dengan slogan Soekarno agar tidak membenci BTI.

Lantas, bagaimana *progresif-revolusioner* dapat ditempatkan dalam kerangka apa yang diidentifikasi Bouchier sebagai ideologi Indonesia sebagai "negara keluarga"? Secara hipotetis, akan sulit untuk mendekatkan *progresif-revolusioner* di satu sisi dengan nasionalisme Indonesia di sisi lain, mengingat sifat khas munculnya nasionalisme—terutama pada 1940-an di kalangan mahasiswa "Indonesia" di Belanda—di mana "*hubungan organik mereka, keyakinan mereka pada harmoni, timbal balik, dan keseimbangan. Meskipun pandangan tentang budaya Indonesia ini mungkin bersifat paternalistik dan orientalis, banyak pemuda nasionalis menerimanya dengan sepenuh hati.*" (Bouchier, 2016: 27).

Jadi, meskipun tampak sulit, perjuangan revolusioner Soekarno untuk memberantas kekuasaan kolonial dan mengubah masyarakat yang didominasi feodal menjadi masyarakat Indonesia yang lebih adil tetap dilancarkan. Jalan revolusioner ini menuntut agar nasionalisme "harmonis" tersebut harus menghadapi situasi-situasi konflik. Mengingat sifat masyarakat Indonesia yang beragam, jalan revolusioner menuju terwujudnya bangsa yang lebih demokratis seharusnya telah dilalui, dan kolaborasi dengan para pemimpin lain pun menjadi suatu keharusan. Namun, Soekarno lebih percaya diri dalam menempatkan para pemimpin nasional lainnya sebagai "bawahannya". Sehingga, kita kini mungkin memiliki kesan yang kuat betapa para ideolog pada masa revolusi itu begitu condong pada "teori" reformasi sosial mereka sendiri, yang didorong oleh ideologi namun minim pengetahuan mengenai aspek-aspek sosiokultural masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa istilah "*progresif-revolusioner*" dalam sejarah politik Indonesia merupakan konstruksi politik yang maknanya sangat dipengaruhi oleh konteks ideologis masa Demokrasi Terpimpin. *Progresif-revolusioner* sebagai terminologi politik memang mencerminkan semangat perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme sehingga dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi patriotisme. Namun, penggunaan istilah tersebut juga bisa dimaknai sebagai pembedaan warga negara berdasarkan afiliasi ideologi politik dan untuk membenarkan tindakan revolusi sosial terhadap kelompok lain dengan mengubah makna patriotisme dari cinta terhadap bangsa menjadi loyalitas terhadap ideologi tertentu.

Dalam dimensi perjuangan melawan kaum imperialis, *progresif-revolusioner* --baik di kalangan elite maupun massa-- bersifat patriotik dalam manifestasinya. Namun, dalam bentuk latennya, patriotisme yang didasarkan pada ideologi tampaknya tidak menyerupai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa secara keseluruhan. *Progresif-revolusioner* lebih tepat dipahami sebagai bentuk patriotisme ideologis (*ideological patriotism*) yang didasarkan pada indikator-indikator patriotisme yang menekankan cinta terhadap bangsa secara inklusif, yang dalam praktiknya cenderung berkembang menjadi patriotisme buta, karena loyalitas lebih ditujukan kepada ideologi daripada kepada bangsa secara keseluruhan. Konsekuensinya, *progresif-*

revolutioner justru bersifat tidak patriotik dalam dimensi revolusi sosial, terutama dalam strategi pemberantasan feodalisme di tanah air.

UCAPAN TERIMAKASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Rektor Universitas Nasional atas pemberian dana penelitian tahun 2022. Topik awal dari penelitian yang diusulkan ini adalah “Pertumbuhan Patriotisme Masyarakat dan Dilema Doktrin Politik Kelompok Komunis di Indonesia”.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.).
- Anderson, B. R. O'G. (Trans.). (1974). *Revolution and social tensions in Surakarta, 1945–1950* (Original work by Soejatno). Cornell Modern Indonesia Project.
- Artika, I. W. (2016). Lima cerpen propaganda LEKRA (1950–1965). *Aksara*, 28(2), 133–146.
- Bisri, A. Z. (2021). Patriotism of ulama in the coastal areas of Java: Philosophy and political doctrine of K.H. Muchlas Tegal (1886–1964). In *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2020)* (pp. 1–14). Atlantis Press.
- Bitschnau, M., & MüBotter, M. (2024). (National) pride and (conceptual) prejudice: Critical remarks on the distinction between patriotism and nationalism. *Journal of Political Ideologies*, 29(1), 64–78.
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. Routledge.
- Dimiyati, F. (2017, January 16). Tarekat sebagai gerakan progresif revolusioner. NU Online. <https://www.nu.or.id>
- Estrelita, G. T. (2022). *The Catholic priests, the political prisoners, and the military: History of a new religio-political chessboard in Indonesia*. Amsterdam University Press.
- Fakih, F. (2014). Akar-akar kanan daripada nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam konteks kesejarahannya. *Lembaran Sejarah*, 11(1), 37–49.
- Gellner, E. (1983). *Nations and nationalism*. Basil Blackwell.
- Gergen, K. J. (2018). The social construction of reality: Traces and transformation. In T. Salzmänn, B. G. Schmidt, & W. Streeck (Eds.), *Social construction as paradigm? The legacy of The Social Construction of Reality* (pp. 259–272). Routledge.
- Gonggong, A. (2013). Epilog. In S. Said, *Dari Gestapu ke reformasi: Serangkaian kesaksian* (pp. 561–576). PT Mizan Pustaka.
- Houswedell, P. C. (1973). Soekarno: A radical or conservative? *Indonesia*, 15, 109–143.
- Huizer, G. (1972). *Peasant mobilization and land reform in Indonesia (Working Paper)*. Institute of Social Studies.
- Kahin, G. M. (1955). Some recollections and reflections on the Indonesian revolution. *Indonesia*.
- Manurung, A. D. R. (2022). Relevansi, revitalisasi, dan reaktualisasi Marhaenisme menjawab kompleksitas permasalahan bangsa. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 2(1), 50–65. <https://doi.org/10.63758/jpp.v2i1.8>
- Müller, J.-W., & Scheppele, K. L. (2008). Constitutional patriotism: An introduction. *International Journal of Constitutional Law*, 6(1), 67–71. <https://doi.org/10.1093/icon/mom039>
- Nathanson, S. (1993). *Patriotism, morality, and peace*. Rowman & Littlefield.
- Nurjihadi. (2019). Review terhadap gagasan reforma agraria Indonesia: Antara wacana, kepentingan dan konflik ideologi ekonomi. *Nusantara Journal of Economics*, 1(2), 1–12.
- Pohlman, A. (2011). Women and nationalism in Indonesia. *International Journal of History Education*, 12(1), 13–22.
- Reid, A. (1974). Marxist attitudes to social revolution, 1946–1948. *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, 8(1), 45–56.
- Renan, E. (1990). What is a nation? In H. K. Bhabha (Ed.), *Nation and narration* (pp. 8–22). Routledge. (Original work published 1882)
- Samidi, R., & Kusuma, W. J. (2020). Analisis kritis eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. *Harmoni*, 5(1), 30–39.
- Schatz, R. T., Staub, E., & Lavine, H. (1999). On the varieties of national attachment: Blind versus constructive patriotism. *Political Psychology*, 20(1), 151–174.
- Schwartz, A. (2011). Patriotism of integrity? Constitutional community in divided societies. *Oxford Journal of Legal Studies*, 31(3), 503–526.
- Soejatno. (1974). *Revolution and social tensions in Surakarta, 1945–1950* (B. R. O'G. Anderson, Trans.). Cornell Modern Indonesia Project.
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya pada arah sistem pendidikan nasional Indonesia (1950–1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1).

- Suseno, F. M. (2015). Sesudah 50 tahun kita harus berani menghadapi apa yang terjadi. *Jurnal Ledalero*, 14(2), 332–340. <https://doi.org/10.31385/JL.V14I2.21.332-340>
- Viroli, M. (1995). *For love of country: An essay on patriotism and nationalism*. Oxford University Press.
- Weichlein, S. (2006). Cosmopolitanism, patriotism, nationalism: Unity in diversity in European culture. In *Proceedings of the British Academy* (Vol. 134, pp. 77–99). Oxford University Press.